**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi, untuk mewujudkan pencapaian tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem manajemen strategik, yang salah satu unsurnya harus membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban (*accountabillity)* yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan dan peningkatan kualitas Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi public dan terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governence), sehingga dunia usaha (Corporate governance) dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani dengan baik dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena peningkatan kualitas Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah.

Penerapan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efesien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap isntansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat untuk memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Memeliharan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Target kinerja yang harus dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2016, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing program yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Pengelolaan Manajemen Aparatur di Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2016 dengan mengetengahkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud.

* 1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 , No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Pertanggung Jawaban, Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Terhadap Masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Daerah Pasal 1 Ayat 3.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
    1. Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyajikan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) tahun 2016 tersebut merupakan perbandingan antara Perjanjian Kinerja (performance covenant) dengan Realisasi Kinerja 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan didukung oleh data-data yang rasional.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan terindentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I  BAB II  BAB III  BAB IV | :  :  :  : | Pendahuluan  Menjelaskan Latar Belakang yang berisikan Gambaran Umum; Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan.  Rencana Strategis dan Rencana Kinerja  Menjelaskan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013-2018 mencakup Visi dan Misi; Rencana Kinerja; Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2016.  Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menjelaskan tentang Ke rangka Pengukuran Kinerja; Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja mencakup Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  Penutup |

**BAB II**

**RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA**

* 1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Periode 2013-2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional dan global.

Seiring dengan adanya perubahan sasaran SKPD yang tertuang dalam RPJMD perubahan, maka visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penyesuaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013 sampai dengan 2018, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

* + 1. **Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Kota Bekasi, dalam menetapkan visi yang mengacu pada visi Kota Bekasi dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok.

Kebijakan penanganan ketentraman dan ketertiban umum sesuai RPJMD kota Bekasi adalah Pengelolaan Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum, Misi ke-5 (lima) yaitu Misi kelima pembangunan Kota Bekasi adalah “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai“. Tujuan dari Misi ini adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban. Tujuan ini diturunkan dalam sasaran operasional meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Visi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah **Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan*.*** Dengan memperhatikan Visi Kota Bekasi dan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib, sejalan dengan hal tersebut maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 adalah :

”**TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM GUNA MENUNJANG VISI KOTA BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”**

Penjelasan dari Visi diatas, adalah sebagai berikut :

Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Bekasi agar Kota Bekasi dalam keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Bekasi, maka dirumuskan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai dan sebagai penjabaran visi.

Rumusan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
2. Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
3. Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap pelanggaran ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
   * 1. **Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya**
        1. TUJUAN

Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Bekasi

1. SASARAN

Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-** | | | | | **KETERANGAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 1. | Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Wilayah tertib K-3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |

* + 1. **STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD**

STRATEGI

1. Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas SATLINMAS
5. KEBIJAKAN

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja :

|  |  |
| --- | --- |
| **Strategi** | **Kebijakan** |
| **Misi kesatu**   * Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | * Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur * Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah * Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| **Misi kedua**   * Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | * Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal * Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT) |
| **Misi ketiga**   * Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. | * Melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; * Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam peneggakkan Peraturan Daerah Kota Bekasi |
| **Misi keempat**   * Meningkatkan Kualitas SATLINMAS | * Meningkatkan pembinaan SATLINMAS * Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat * Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS |

* 1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun anggaran 2016 sesuai dengan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terdiri dari sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS BELANJA** | **JUMLAH**  **PROGRAM** | **JUMLAH**  **KEGIATAN** | **JUMLAH**  **PAGU** |
| 1 | Belanja Langsung Penunjang Urusan | 5 (lima) Program | 25 (dua puluh lima ) Kegiatan | Rp. 27.625.900.000,- |
| 2 | Belanja Langsung Urusan | 1 (satu) Program | 12 (dua belas) Kegiatan | Rp. 9.814.184.000,- |
|  | **TOTAL BELANJA LANGSUNG** |  |  | **RP. 37.440.084.000,-** |

1. **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**
2. **PROGRAM**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

1. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 5 (lima) Program, sebagai berikut :
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Prioritas Belanja Langsung Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) program, sebagai berikut :

**“ Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal “**

1. **KEGIATAN**

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dalam program-program, maka ditetapkan kegiatan-kegiatan.

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja :
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
14. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
15. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
18. Pengadaan Meubelair
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :
23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
24. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
25. Pengadaan Pakaian Olah Raga
26. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27. Pendidikan dan Pelatihan Formal
28. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
29. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
31. Penyusunan Laporan Keuangan
32. Program Prioritas Belanja Langsung Urusan Satuan Polisi Pamong Praja 1 (satu) Program, sebagai berikut :

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, terdiri dari kegiatan :

1. Penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda
2. Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan
3. Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT)
4. Pengamanan Jalan Protokol (Jalan A. Yani, Jalan H. Juanda, Jalan Chairul Anwar dan Jalan Hasibuan)
5. Pengamanan Unjuk Rasa
6. Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
7. Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi
8. Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi
9. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dengan TNI
10. Naskah Akademis Raperda Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum
11. Optimalisasi Peran PPNS Dalam Penegakan Perda
12. Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana
    1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2016. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran yaitu “ **Wilayah tertib K 3 “**

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

TAHUN 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | | |  | **INDIKATOR KINERJA** | | | **TARGET** |
| Mewujudkan Kedisiplinan, Ketertiban Sosial, Keteladanan dan Kehidupan Beragama yang Kondusif dan Terpelihara | | |  | Wilayah Tertib K3 | | | 5% |
|  |  |  | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | **ANGGARAN PERUBAHAN** | | **KET** |  |
| **SEBELUM** | **SESUDAH** |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 24,639,800,000,- | 23.630.300.000,- |  |  |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,951,400,000,- | 1.766.600.000,- |  |  |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1,800,000,000,- | 1.998.000.000,- |  |  |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 135,000,000,- | 55.000.000,- |  |  |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 176,000,000,- | 176.000.000,- |  |  |
| 6 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 8,939,554,000,- | 9.814.184.000,- |  |  |
| **JUMLAH** | | **37,641,754,000,-** | **37.440.084.000,-** |  |  |

* 1. **Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2016**

Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 terdapat alokasi anggaran Rp. **37.440.084.000**,- terdiri dari alokasi Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. Rp. 27.625.900.000,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 9.814.184.000,-,- sebagaimana pada tabel 2.2 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Alokasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI**

**Tahun 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | | **KEGIATAN** | **PAGU** |
| **Rp** |
| **1** | | **2** | **3** |
| **I** |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **23,630,300,000.00** |
|  | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8,000,000.00 |
|  | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6,000,000.00 |
|  | 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 35,000,000.00 |
|  | 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 90,000,000.00 |
|  | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 90,000,000.00 |
|  | 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12,000,000.00 |
|  | 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150,000,000.00 |
|  | 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25,000,000.00 |
|  | 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 40,000,000.00 |
|  | 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 179,000,000.00 |
|  | 11 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 166,500,000.00 |
|  | 12 | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran | 16,978,800,000.00 |
|  | 13 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 50,000,000.00 |
|  | 14 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 5,800,000,000.00 |
| **II** |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **1,766,600,000.00** |
|  | 15 | Pengadaan Meubelair | 80,000,000.00 |
|  | 16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 111,000,000.00 |
|  | 17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1,525,600,000.00 |
|  | 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 50,000,000.00 |
| **III** |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **1,998,000,000.00** |
|  | 19 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 1,398,000,000.00 |
|  | 20 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 100,000,000.00 |
|  | 21 | Pengadaan Pakaian Olah Raga | 500,000,000.00 |
| **IV** |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **55,000,000.00** |
|  | 22 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 40,000,000.00 |
|  | 23 | Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15,000,000.00 |
| **V** |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **176,000,000.00** |
|  | 24 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 60,000,000.00 |
|  | 25 | Penyusunan Laporan Keuangan | 116,000,000.00 |
|  |  | JUMLAH | 27,625,900,000.00 |

**Tabel 2.3**

**Alokasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Urusan**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI**

**Tahun 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | | **KEGIATAN** | **PAGU** |
| **Rp** |
| **1** | | **2** | **3** |
| **I** |  | **Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal** | **9,814,184,000.00** |
|  | 1 | Penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda | 990,000,000.00 |
|  | 2 | Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan | 90,000,000.00 |
|  | 3 | Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 495,000,000.00 |
|  | 4 | Pengamanan Jalan Protokol (Jalan A. Yani, Jalan H. Juanda, Jalan Chairul Anwar dan Jalan Hasibuan) | 824,805,000.00 |
|  | 5 | Pengamanan Unjuk Rasa | 411,664,000.00 |
|  | 6 | Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan | 603,000,000.00 |
|  | 7 | Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi | 162,000,000.00 |
|  | 8 | Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi | 5,250,000,000.00 |
|  | 9 | Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dengan TNI | 360,000,000.00 |
|  | 10 | Naskah Akademis Raperda Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum | 217,500,000.00 |
|  | 11 | Optimalisasi Peran PPNS Dalam Penegakan Perda | 275,215,000.00 |
|  | 12 | Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana | 135,000,000.00 |
|  |  | **JUMLAH** | **9,814,184,000.00** |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2016.

Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 66.877.468.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 29.437.384.000,- dan Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. **9.814.184.000,-** dan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebesar Rp. 27.625.900.000,-sebagaimana tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**ANGGARAN BELANJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRJA KOTA BEKASI**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS BELANJA** | **PAGU**  **Rp** |
| 1 | Belanja Tidang Langsung | 29.437.384.000,- |
| 2 | Belanja Langsung Penunjang Urusan | 27.625.900.000,- |
| 3 | Belanja Langsung Urusan | 9.814.184.000,- |
|  | **JUMLAH** | **66.877.468.000,-** |

* 1. **Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundangan-undangan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**85 s/d 100 : Sangat Berhasil**

**70 s/d** < **85 : Berhasil**

**55 s/d** < **70 : Cukup Berhasil**

**0 s/d < 55 : Kurang Berhasil**

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0 (nol).

* 1. **Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menganalisa dan mengukur kinerjanya guna mewujudkan visi dan misi organisasi, sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Program serta 4 (empat) indikator kinerja dengan 12 (dua belas) kegiatan, sesuai yang terdapat dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

**Sasaran Kinerja, Program, Indikator kinerja**

**Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR SASARAN** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA**  **PROGRAM/KEGIATAN** | **TARGET** | **SATUAN** | **PAGU**  **Rp** |
| **I** | **Wilayah Tertib K-3** | **Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal** | **Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas** | 15 | Persen | **9,814,184,000.00** |
| Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 | 11 | Persen |
| Persentase Pos Siskampling yang berfungsi | 75 | Persen |
| Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas | 5 | Persen |
| 1 |  | Penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda | Jumlah kegiatan Penegakkan Perda | 104 | Kegiatan | 990,000,000.00 |
| Jumlah sidang Tipiring Becak | 500 | Sidang |  |
| 2 |  | Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan | Tersedianya aplikasi pemetaan | 1 | Aplikasi | 90,000,000.00 |
| 3 |  | Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) | Jumlah penertiban PSK | 22 | Kegiatan | 495,000,000.00 |
| Jumlah Pengiriman PSK | 10 | Kali |  |
| Jumlah Penertiban PMKS | 13 | Kegiatan |  |
| Jumlah Pasca Penertiban PMKS | 7 | Kali |  |
| 4 |  | Pengamanan Jalan Protokol (Jalan A. Yani, Jalan H. Juanda, Jalan Chairul Anwar dan Jalan Hasibuan) | Jumlah pengamanan jalan protokol | 78 | Kegiatan | 824,805,000.00 |
| 5 |  | Pengamanan Unjuk Rasa | Jumlah pengamanan unjuk rasa | 29 | kegiatan | 411,664,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan | Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional dan keagamaan | 34 | kegiatan | 603,000,000.00 |
| 7 |  | Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi | Terselenggaranya HUT Satpol PP Tingkat Kota Bekasi | 1 | Kegiatan | 162,000,000.00 |
| Partisipasi HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Barat | 1 | Kegiatan |  |
| 8 |  | Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi | Jumlah linmas aktif penerima penyelenggaraan Linmas | 1736 | Orang | 5,250,000,000.00 |
| Jumlah peserta beladiri anggota Linmas | 302 | Orang |  |
| 9 |  | Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dengan TNI | Terlaksananya Pengembangan Kemampuan Anggota Satpol PP dengan TNI | 50 | Orang | 360,000,000.00 |
| 10 |  | Naskah Akademis Raperda Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum | Jumlah naskah raperda yang diselesaikan | 1 | Raperda | 217,500,000.00 |
| 11 |  | Optimalisasi Peran PPNS Dalam Penegakan Perda | Jumlah peserta pelatihan PPNS | 73 | Orang | 275,215,000.00 |
| Jumlah kasus yang diselesaikan | 3 | Kasus |  |
| 12 |  | Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana | Jumlah kegiatan penanggulangan bencana | 1 | Kegiatan | 135,000,000.00 |
| Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana | 280 | Orang |  |

3.3. HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA FISIK DAN KEUANGAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2016 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja tahun 2016, adapun seluruh capaian kinerja dan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA**  **PROGRAM/KEGIATAN** | **SATUAN** | **TARGET** | | **REALISASI** | | | | **KET** |
| **FISIK** | **PAGU** | **FISIK** | **%** | **PAGU** | **%** |
| **I** | **Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal** | Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas | Persen | 15 | **9.814.184.000,-** | **-** | **-** | **951.5991.015,-** | **93.85** |  |
| Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 | Persen | 11 | 12 | 109.09 |  |  |  |
| Persentase Pos Siskampling yang berfungsi | Persen | 75 | 100 | 133.33 |  |  |  |
| Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas | Persen | 5 | 12 | 242.20 |  |  |  |
| 1 | Penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda | Jumlah kegiatan Penegakkan Perda | Kegiatan | 104 | 990.000.000,- | 104 | 100 | 976.490.000,- | 98.64 |  |
| Jumlah sidang Tipiring Becak | Sidang | 500 |  | 62 | 12.40 |  |  |  |
| 2 | Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan | Tersedianya aplikasi pemetaan | Aplikasi | 1 | 90.000.000,- | 1 | 100 | 59.687.000,- | 66.32 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA**  **PROGRAM/KEGIATAN** | **SATUAN** | **TARGET** | | **REALISASI** | | | | **KET** |
| **Fisik** | **Pagu** | **FISIK** | **%** | **PAGU** | **%** |
| 3 | Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) | Jumlah penertiban PSK | Kegiatan | 22 | 495.000.000,- | 22 | 100 | 491.240.000,- | 99.24 |  |
| Jumlah Pengiriman PSK | Kali | 10 |  | 7 | 70 |  |  |  |
| Jumlah Penertiban PMKS | Kegiatan | 13 |  | 13 | 100 |  |  |  |
| Jumlah Pasca Penertiban PMKS | Kali | 7 |  | 7 | 100 |  |  |  |
| 4 | Pengamanan Jalan Protokol (Jalan A. Yani, Jalan H. Juanda, Jalan Chairul Anwar dan Jalan Hasibuan) | Jumlah pengamanan jalan protocol | Kegiatan | 78 | 824.805.000,- | 78 | 100 | 795.547.800,- | 96.45 |  |
| 5 | Pengamanan Unjuk Rasa | Jumlah pengamanan unjuk rasa | Kegiatan | 29 | 411.664.000,- | 29 | 100 | 409.260.000,- | 99.42 |  |
| 6 | Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan | Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional dan keagamaan | Kegiatan | 34 | 603.000.000,- | 34 | 100 | 515.458.000,- | 85.48 |  |
| 7 | Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi | Terselenggaranya HUT Satpol PP Tingkat Kota Bekasi | Kegiatan | 1 | 162.000.000,- | 1 | 100 | 136.413.500,- | 84.21 |  |
| Partisipasi HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Barat | Kegiatan | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |
| 8 | Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi | Jumlah linmas aktif penerima penyelenggaraan Linmas | Orang | 1736 | 5.250.000.000,- | 1736 | 100 | 5.187.811.800,- | 98.82 |  |
| Jumlah peserta beladiri anggota Linmas | Orang | 302 |  | 302 | 100 |  |  |  |
| 9 | Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dengan TNI | Terlaksananya Pengembangan Kemampuan Anggota Satpol PP dengan TNI | Orang | 50 | 360.000.000,- | 50 | 100 | 348.367.250,- | 96.77 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA**  **PROGRAM/KEGIATAN** | **SATUAN** | **TARGET** | | **REALISASI** | | | | **KET** |
| **Fisik** | **Pagu** | **FISIK** | **%** | **PAGU** | **%** |
| 10 | Naskah Akademis Raperda Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum | Jumlah naskah raperda yang diselesaikan | Raperda | 1 | 217.500.000,- | 1 | 100 | 212.757.015,- | 97.82 |  |
| 11 | Optimalisasi Peran PPNS Dalam Penegakan Perda | Jumlah peserta pelatihan PPNS | Orang | 73 | 275.215.000,- | 73 | 100 | 252.671.500,- | 91.81 |  |
| Jumlah kasus yang diselesaikan | Kasus | 3 |  | 3 | 100 |  |  |  |
| 12 | Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana | Jumlah kegiatan pelatihan penanggulangan bencana | Kegiatan | 1 | 135.000.000,- | 1 | 100 | 130.287.150,- | 96.51 |  |
| Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana | Orang | 280 |  | 280 | 100 |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  | 9.814.184.000 |  | 97.85 % | 9.515.991.015 | 96.96 % |  |

3.3.1 Analisa dari pencapaian Indikator kinerja Program sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**

**Pencapaian Indikator Kinerja Program**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Sasaran** | **Program** | **Indikator Kinerja Program (outcome)** | **Satuan** | **Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD** | **TA. 2016** | | | **Keterangan** |
|
| **Target** | **Realisasi** | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | | |  |
| Wilaya tertib K3 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas | % | 0 | 15 | |  | Data pada Kesbangpol Kota Bekasi |
| Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 | % | 10 | 11 | | 12.00 | Jumlah pelanggaran tahun perda kondisi awal sebanyak 1602, tahun 2016 jumlah pelanggaran perda 1418, hal ini berkurang sebesar 12 % |
| Persentase Pos Siskampling yang berfungsi | % | 100 | 75 | | 100.00 | Jumlah pos siskamling 124 pos, yang berfungsi 124 pos |
| Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas | % | 2 | 5 | | 12.12 | Jumlah pelanggaran gangguan kantrantibmas Kondisi Awal sebanyak 4133 pelanggaran, tahun 2016 pelanggaran kantrantibmas sebanyak 3632, terjadi penurunan sebesar 12.12 % |

Berdasarkan tabel hasil pengukuran indikator kinerja program dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Target indikator Kinerja Program Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas pada tahun 2016 target berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis sebesar 15 %, tingkat capaian target tersebut dilaksanakan pada Badang Kesbangpol Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi hanya sebagai penunjang atau pendukung kegiatan peningkatan deteksi dini.
2. Target Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 pada tahun 2016 sebesar 11 % tercapai sebesar 12% atau 109,09 persen, hal ini berdasarkan data Jumlah pelanggaran pada kondisi awal sebanyak 1602, tahun 2016 jumlah pelanggaran perda 1418, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mampu mengurangi tingkat pelanggaran perda K-3 di Kota Bekasi sebesar 12 %
3. Target Persentase Pos Siskampling yang berfungsi pada tahun 2016 sebesar 75 % tercapai sebesar 100 %, hal ini berdasarkan data Pos Kamling yang berfungsi dari 124 pos siskamling, seluruhnya masih berfungsi dan digunakan dalam menjaga keamanan lingkungan.
4. Target Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas pada tahun 2016 sebesar 2% tercapai 5 % atau 250 %, hal ini berdasarkan data pada kondisi awal RPJMD tahun 2013 pelanggaran gangguan kamtrantibmas sebesar 4133 pelanggaran, pada tahun 2016 terjadi pelanggaran ganggunan kamtrantibmas sebesar 3632 atau terjadi penurunan pelanggaran gangguan kamtrantibmas sebesar 12.12 %

3.3.2 Analisas dari pencapaian realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut

**Tabel 3.3.2**

**Pencapaian Kinerja Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA**  **PROGRAM/KEGIATAN** | **SATUAN** | **TARGET**  **FISIK** | **REALISASI**  **FISIK** | **PERSENTASE** | **KETERANGAN** |
| **I** | **Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal** | | | | | | |
| 1 | Penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda | Jumlah kegiatan Penegakkan Perda | Kegiatan | 104 | 104 | 100 | Tercapai |
| Jumlah sidang Tipiring Becak | Sidang | 500 | 62 | 12.40 | Belum tercapai |
| 2 | Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan | Tersedianya aplikasi pemetaan | Aplikasi | 1 | 1 | 100 | Tercapai |
| 3 | Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) | Jumlah penertiban PSK | Kegiatan | 22 | 22 | 100 | Tercapai |
| Jumlah Pengiriman PSK | Kali | 10 | 7 | 70 | Belum tercapai |
| Jumlah Penertiban PMKS | Kegiatan | 13 | 13 | 100 | Tercapai |
| Jumlah Pasca Penertiban PMKS | Kali | 7 | 7 | 100 | Tercapai |
| 4 | Pengamanan Jalan Protokol (Jalan A. Yani, Jalan H. Juanda, Jalan Chairul Anwar dan Jalan Hasibuan) | Jumlah pengamanan jalan protocol | Kegiatan | 78 | 78 | 100 | Tercapai |
| 5 | Pengamanan Unjuk Rasa | Jumlah pengamanan unjuk rasa | Kegiatan | 29 | 29 | 100 | Tercapai |
| 6 | Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan | Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional dan keagamaan | Kegiatan | 34 | 34 | 100 | Tercapai |
| 7 | Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi | Terselenggaranya HUT Satpol PP Tingkat Kota Bekasi | Kegiatan | 1 | 1 | 100 | Tercapai |
| Partisipasi HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Barat | Kegiatan | 1 | 1 | 100 | Tercapai |
| 8 | Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi | Jumlah linmas aktif penerima penyelenggaraan Linmas | Orang | 1736 | 1736 | 100 | Tercapai |
| Jumlah peserta beladiri anggota Linmas | Orang | 302 | 302 | 100 | Tercapai |
| 9 | Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dengan TNI | Terlaksananya Pengembangan Kemampuan Anggota Satpol PP dengan TNI | Orang | 50 | 50 | 100 | Tercapai |
| 10 | Naskah Akademis Raperda Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum | Jumlah naskah raperda yang diselesaikan | Raperda | 1 | 1 | 100 | Tercapai |
| 11 | Optimalisasi Peran PPNS Dalam Penegakan Perda | Jumlah peserta pelatihan PPNS | Orang | 73 | 73 | 100 | Tercapai |
| Jumlah kasus yang diselesaikan | Kasus | 3 | 3 | 100 | Tercapai |
| 12 | Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana | Jumlah kegiatan pelatihan penanggulangan bencana | Kegiatan | 1 | 1 | 100 | Tercapai |
| Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana | Orang | 280 | 280 | 100 | Tercapai |
|  | Total Capaian Kinerja Kegiatan | |  |  |  | 97.85 % |  |

Berdasarkan table 3.3.2 diatas realisasi target kinerja kegiatan di jabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda dengan 2 (dua) indicator kinerja sebagai berikut :
   1. Jumlah kegiatan Penegakkan Perda dengan target 104 kegiatan tercapai 10 kegiatan atau 100 %
   2. Jumlah sidang Tipiring Becak dengan target 500 kali sidang tipiring tercapai 62 kali sidang tipiring atau 12.40 %, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
      * Menurunnya tingkat pelanggaran di jalan protokol di karenakan para pelanggar perda sudah mengerti dan mematuhi peraturan daerah bebas becak dan kendaraan tidak bermotor di kota bekasi
      * Patroli rutin yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sehingga para pelanggar becak dapat di minimalisir
      * Kesadaran masyarakat mematuhi larangan penggunaan becak di kasawasan bebas becak
2. Kegiatan Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan dengan indicator kinerja tersedianya aplikasi pemetaan gangguan Kantrantibu target 1 (satu) aplikasi, terealisasi 1 (satu) aplikasi atau 100 %
3. Kegiatan Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :
   1. Jumlah penertiban PSK target 22 kegiatan terealisasi 22 kegiatan atau 100 %
   2. Jumlah Pengiriman PSK target 10 PSK terealisasi 7 PSK atau 70 %, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
      * Terlalu berdekatannya jarak pengiriman pelaku tindak tipiring kususnya psk
      * Sudah di lakukan pengiriman tetapi tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang di tentukan oleh pihak PSKW ( Panti Sosial Karya Wanita ) pasar rebo salah satunya anak di bawah umur
   3. Jumlah Penertiban PMKS target 13 kegiatan terealisasi 13 kegiatan atau 100 %
   4. Jumlah Pasca Penertiban PMKS target 7 kegiatan terealisasi 7 kegiatan atau 100 %
4. Kegiatan Pengamanan Jalan Protokol dengan indicator kinerja Jumlah pengamanan jalan protocol target 78 kegiatan, realisasi 78 kegiatan atau 100 %
5. Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa dengan indicator kinerja jumlah pengamanan unjuk rasa target 29 kali, realisasi 29 kali atau 100 %
6. Kegiatan Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan dengan indicator kinerja Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional dan keagamaan target 34 kegiatan realisasi 34 kegiatan atau 100 %
7. Kegiatan Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi dengan 2 (dua) indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   1. Terselenggaranya HUT Satpol PP Tingkat Kota Bekasi target 1 kegiatan, realisasi 1 kegiatan atau 100 %
   2. Partisipasi HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Barat target 1 kegiatan, realisasi 1 kegiatan atau 100 %
8. Kegiatan Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi dengan 2 (dua) indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
   1. Jumlah linmas aktif penerima penyelenggaraan Linmas target 1736 orang, realisasi 1736 orang atau 100 %
   2. Jumlah peserta beladiri anggota Linmas target 302 orang, realisasi 302 orang atau 100 %
9. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dengan TNI dengan indicator kinerja kegiatan Terlaksananya Pengembangan Kemampuan Anggota Satpol PP dengan TNI target 50 peserta kesemaptaan, realisasi peserta yang mengikuti kesemampataan 50 orang peserta atau 100 %
10. Kegiatan Naskah Akademis Raperda Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum dengan indicator kinerja kegiatan Jumlah naskah raperda yang diselesaikan target 1 naska raperda, realisasi 1 naska raperda yang diselesaikan atau 100 %
11. Kegiatan Optimalisasi Peran PPNS Dalam Penegakan Perda dengan 2 (dua) indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
    1. Jumlah peserta pelatihan PPNS target 73 orang, realisasi 73 orang atau 100 %
    2. Jumlah kasus yang diselesaikan target 3 kasus pelanggaran perda, realisasi 3 kasus pelanggaran perda atau 100 %
12. Kegiatan Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana dengan 2 (dua) indicator kinerja, sebagai berikut :
    1. Jumlah kegiatan pelatihan penanggulangan bencana, target 1 kegiatan, realisasi 1 kegiatan atau 100 %
    2. Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana, target 280 orang, realisasi 280 atau 100 %

Total Akumulasi capaian target indicator kinerja kegiatan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal sebesar 97.85 % atau **SANGAT BERHASIL.**

3.3.3 Analisasi dari pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2**

**Pencapaian Kinerja Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program/Kegiatan** | **PAGU** | **Realisasi**  **Rp** | **Persen** | **KET** |
|  | **Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal** | |  |  |  |
| 1 | Penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda | 990,000,000 | 976,490,000 | 98.64% | EFEKTIF |
| 2 | Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan | 90,000,000 | 59,687,000 | 66.32% | EFISIEN |
| 3 | Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 495,000,000 | 491,240,000 | 99.24% | EFEKTIF |
| 4 | Pengamanan Jalan Protokol (Jalan A. Yani, Jalan H. Juanda, Jalan Chairul Anwar dan Jalan Hasibuan) | 824,805,000 | 795,547,800 | 96.45% | EFEKTIF |
| 5 | Pengamanan Unjuk Rasa | 411,664,000 | 409,260,000 | 99.42% | EFEKTIF |
| 6 | Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan | 603,000,000 | 515,458,000 | 85.48% | EFEKTIF/  EFISIEN |
| 7 | Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi | 162,000,000 | 136,413,500 | 84.21% | EFEKTIF/  EFISIEN |
| 8 | Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi | 5,250,000,000 | 5,187,811,800 | 98.82% | EFEKTIF |
| 9 | Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dengan TNI | 360,000,000 | 348,367,250 | 96.77% | EFEKTIF |
| 10 | Naskah Akademis Raperda Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum | 217,500,000 | 212,757,015 | 97.82% | EFEKTIF |
| 11 | Optimalisasi Peran PPNS Dalam Penegakan Perda | 275,215,000 | 252,671,500 | 91.81% | EFEKTIF |
| 12 | Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana | 135,000,000 | 130,287,150 | 96.51% | EFEKTIF |
| **JUMLAH** | | **9,814,184,000** | **9,515,991,015** | **96.96%** |  |

Berdasarkan table 3.3.3 diatas realisasi target keuangan pagu anggaran kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penegakan, Penindakan Pengawasan dan Pengamanan Perda pagu Rp. 990,000,000, realisasi Rp. 976,490,000 atau 98.64%.
2. Kegiatan Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan pagu anggaran Rp. 90,000,000, realisasi Rp. 59,687,000 atau 66.32 %
3. Kegiatan Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan pagu anggaran Rp. 495,000,000, realisasi Rp. 491,240,000 atau 99.24 %
4. Kegiatan Pengamanan Jalan Protokol dengan pagu anggaran Rp. 824,805,000, realisasi Rp. 795,547,800 atau 96.45 %
5. Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa dengan pagu anggaran Rp. 411,664,000, realisasi Rp. 409,260,000 atau 99.42%
6. Kegiatan Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan dengan pagu anggarn Rp. 603,000,000, realisasi Rp. 515,458,000 atau 85.48%
7. Kegiatan Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi dengan pagu anggaran Rp. 162,000,000, realisasi Rp. 136,413,500 atau 84.21%
8. Kegiatan Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi dengan pagu anggaran Rp. 5,250,000,000, realisasi Rp. 5,187,811,800 atau 98.82%
9. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dengan TNI dengan pagu anggaran Rp. 360,000,000, realisasi Rp. 348,367,250 atau 96.77%
10. Kegiatan Naskah Akademis Raperda Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp. 217,500,000, realisasi Rp. 212,757,015 atau 97.82 %
11. Kegiatan Optimalisasi Peran PPNS Dalam Penegakan Perda dengan pagu anggaran Rp. 275,215,000, realisasi Rp. 252,671,500 atau 91.81%
12. Kegiatan Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran Rp. 135,000,000, realisasi Rp. 130,287,150 atau 96.51%

**BAB IV PENUTUP**

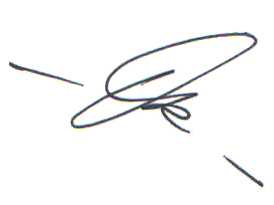
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun

2013-2018 dengan visi **Terwujudnya Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Guna Menunjang Visi Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan ,** dalam mewujudkan visi Kota Bekasi. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2016 terdapat sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Program serta 4 (empat) indikator kinerja dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan alokasi anggaran 2016 sebesar Rp. 9.814.184.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 9.515.991.015 atau 96.96 %

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 mengacu kepada 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Program serta 4 (empat) indikator kinerja dengan 12 (dua belas) kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dengan hasil capaian sebesar 89 s/d 100 (**Predikat Sangat Berhasil**), sehingga seluruh kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2016 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik.

Melalui penyajian LAKIP Tahun 2016 Satuan Polisi Pamog Praja Kota Bekasi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KEPALA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

**CECEP SUHERLAN, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630328 198503 1 009

**Tabel 4.1**

**Hasil Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

**Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR SASARAN** | **PROGRAM/**  **KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA**  **PROGRAM** | **CAPAIAN KINERJE** | **PREDIKAT** |
| I | Wilayah Tertib K-3 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas |  |  |
| Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 | 12.00 | Sangat Berhasil |
| Persentase Pos Siskampling yang berfungsi | 100.00 | Sangat Berhasil |
| Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas | 12.12 | Sangat Berhasil |

KEPALA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

**CECEP SUHERLAN, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630328 198503 1 009